

BAB II

FENOMENA PARPOL DAN TKI DI MALAYSIA

2.1 Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia

Perkara migrasi WNI ke Malaysia sudah lama terjadi semenjak kolonial Inggris datang ke Malaysia hingga kemudian terjadi peningkatan buruh migran dari Sumatra, Kalimantan dan Jawa ke Malaysia (Verma, 2002). Peningkatan tersebut muncul akibat regulasi serta kebutuhan sosial WNI yang berubah berdasarkan tuntutan ekonomi dalam perdagangan internasional dari Indonesia ke Malaysia yang dianggap menguntungkan kedua pihak. Adanya persamaan budaya yaitu Bangsa Melayu yang kita kenal dengan *serumpun* telah memperkuat hubungan kedua negara. Korelasi yang baik antara keduanya mengakibatkan munculnya gerakan transnasional yang berlangsung dari zaman penjajahan sampai sekarang. Walaupun hubungan diplomatik kedua negara mengalami pasang surut namun kesamaan latar belakang tersebut telah menandai kelangsungan mobilitas WNI ke Malaysia secara dinamis dan stabil berada dalam kondisi yang baik.

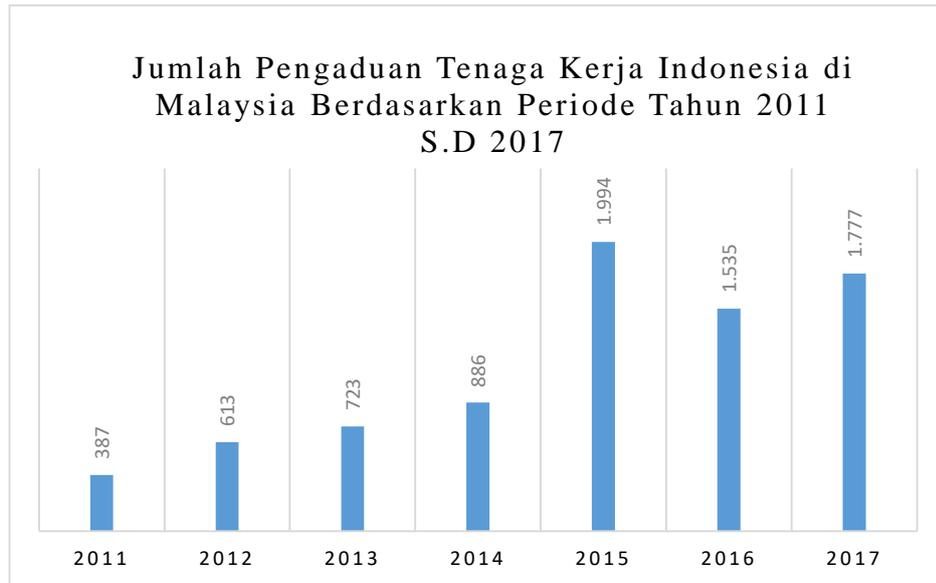
Proses migrasi WNI ke Malaysia berkembang setelah rezim Orde Baru membuka arus ekonomi liberal membuat banyak masyarakat WNI berbondong-bondong ke Malaysia untuk mencari lapangan pekerjaan baru. Mobilitas ekonomi tersebut membuat atmosfer hubungan Indonesia dan Malaysia pada dekade 90an semakin kuat seiring banyaknya WNI yang menetap untuk menjadi TKI di Malaysia. Bahkan pada perkembangannya akhir tahun 2015 pemerintah kawasan Asia Tenggara *Association of Southeast Asia Nations ASEAN* telah mendukung

perekonomian kawasan dengan meresmikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk melakukan integrasi serta membuka arus perekonomian masyarakat regional Asia Tenggara. Tidak kurang dari 2 juta WNI yang berada di Malaysia merupakan komunitas pekerja besar WNI tersebut secara tidak langsung sudah menjalankan program pemerintah kawasan Asia Tenggara sejak dulu.

Munculnya klarifikasi di atas menunjukkan bahwa WNI di Malaysia bergerak dinamis dari tahun ke tahun. Letak geografis kedua negara yang berdampingan mendukung adanya WNI untuk meningkatkan perekonomian maupun pendidikan yang menjadi kebutuhan primer masyarakat. Kelangsungan hidup mereka tersebar di berbagai wilayah di negara bagian Malaysia yang mengalami perubahan tempat tinggal akibat tuntutan pekerjaan yang berubah-ubah.

Belum lagi banyak TKI ilegal yang masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi diantaranya daerah seperti Batam, Siapi Api, Tawau, Sebatik dan Sandong yang menjadi jalur masuknya TKI legal maupun ilegal menuju Kuala Lumpur dan merambat ke wilayah-wilayah lain terutama di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Data yang kami dapat dari BNP2TKI dalam penempatan TKI 2011-2017 telah menunjukkan kondisi kenaikan TKI di Malaysia :

Tabel 1. Subdit Pengolahan Data Puslitfo BNP2TKI 2014



Sumber : Subdit Pengolahan Data Puslitfo BNP2TKI 2014 (Ir. Ade Esther Panjaitan, 2015)

Kehidupan WNI di Malaysia tidak lepas dari interaksi sosial yang ada pada kehidupan mereka sehari-hari terutama kaitannya dengan mata pencaharian. Berbagai pelanggaran hukum oleh WNI juga terjadi di beberapa daerah di Malaysia sehingga perlindungan WNI menjadi prioritas utama oleh kedua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan karena banyaknya masalah TKI yang terhitung 321 kasus terjadi dari 2014-2015 (Sekarwati, Suci, 2018). Dalam konteks perlindungan ini pemerintah Indonesia telah menetapkan pasal baru yang terdapat pada undang-undang negara nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan TKI (Indonesia, 2017). Sebagai tanggapan serius pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia dalam menangani permasalahan TKI di luar negeri. Dengan banyaknya kasus yang di alami oleh WNI di Malaysia maka BNP2TKI memperkuat pengawalan dalam perlindungan TKI di Malaysia.

2.2 Fungsi dan peran parpol

Terbukanya keran demokrasi besar-besaran terjadi pada pemilu tahun 2004 yang lalu dengan mekanisme pemilihan menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat terhadap calon legislatif maupun eksekutif yang membuat pembangunan demokrasi negara semakin terbuka. Setelah demokrasi elektoral tersebut kebebasan berpolitik masyarakat semakin tinggi didukung dengan adanya pendidikan politik yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Dukungan elektoral itu sebagai sarana transformasi bagi peningkatan demokrasi Indonesia. Oleh karenanya partisipasi aktif masyarakat melalui parpol terjadi bukan hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri dengan fungsi untuk mengagregasikan kepentingan serta nilai-nilai kepada masyarakat, maka dengan itu parpol dapat mendidik, mengawasi, merekrut serta menduduki kursi di parlemen (Meyer, 2012).

Parpol merupakan sarana politik yang menjadi motor bagi para politikus untuk menduduki kursi di parlemen dengan seksama sesuai fungsinya. Dalam perpolitikan modern hal itu lumrah dilakukan karena memang parpol mempunyai tujuan agar mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kursi di parlemen secara efektif (Labolo, 2014). Fungsi parpol tersebut sudah berada di dalam konstitusi negara yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 yaitu sebagai organisasi masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan partisipasi politik WNI di parlemen (RI, Sekretariat Negara, 2008)

Undang-undang tersebut tidak hanya berlaku pada WNI yang berada di dalam negeri saja melainkan juga WNI di luar negeri yang mempunyai hak atas kesejahteraan sesuai dengan fungsinya parpol terhadap WNI di luar negeri khususnya WNI di Malaysia yang menjadi lumbung TKI terbanyak di luar negeri. Catatan World bank menjelaskan bahwa pada tahun 2016 terdapat 9 juta WNI di luar negeri berdasarkan remitansi atau transfer uang pekerja asing ke negara penerima (Embu, 2017) sementara itu terdapat 2 juta lebih TKI berada di Malaysia maka terdapat korelasi antara jumlah TKI dan pemilu sehingga dapat menyumbang 2-3 kursi di DPR RI dan suara yang cukup signifikan untuk mengimplementasikan konstitusi negara dalam kemenangan pemilu legislatif maupun presiden.

2.3 Mekanisme PEMILU

Secara konstitusi pemilihan di luar negeri sudah mempunyai landasan hukum tersendiri melalui mekanisme yang jelas yaitu berada di bawah tugas dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bersifat independen di bawah naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Menurut undang-undang yang sah pemilu luar negeri berada dalam koridor wewenang PPLN secara resmi. Kedudukan PPLN di luar negeri berada di bawah undang-undang ayat 4 pasal 2 yang menjelaskan bahwa pemilihan luar negeri berada di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dengan pelaksana PPD 1 Jakarta (Drs. C. S. T, 1986). Agenda pemilu di luar negeri tersebut berada di bawah kendali pemerintah dalam rangka menyukseskan demokrasi negara, sehingga dapat menjadi *platform* dalam pemilu dalam mengimplementasikan undang-undang negara sebagaimana mestinya.

KPU sudah menyiapkan strategi dalam menyukseskan pemilu luar negeri semaksimal mungkin walaupun memang realitas di lapangan kurang mendapat dukungan oleh masyarakat akibat banyaknya kendala yang dihadapi TKI untuk melakukan pemilu. Dapat dilihat dari partisipasi pemilih pada tahun 2014 kemarin jumlah pemilih yang di targetkan sebanyak 322. 429 pemilih, namun ternyata jumlah pemilih yang hadir melalui pencoblosan langsung hanya 1.000 pemilih di Malaysia yang sudah melakukan pencoblosan (Bonasir, 2014). Usaha pemerintah dalam menyukseskan pemilu telah dikerjakan diantaranya berupa himbauan bagi negara-negara penempatan TKI untuk meliburkan para TKI yang bekerja di negaranya untuk melakukan pemilihan di TPS maupun surat suara yang dikirimkan lewat pos maupun *Drop Box*. Kemudian disisi lain, terdapat tuntutan kuat kepada PPLN di luar negeri dalam pelaksanaan pemilu oleh TKI karena mereka harus diberi ruang dan fasilitas yang baik untuk melakukan pemilu di luar negeri dengan seksama khususnya Malaysia dan Hongkong (Suprpto, 2009).

Sehubungan dengan analisis penulis dalam aktivitas politik parpol maka secara umum penulis akan meninjau lebih detail mengenai aktivitas parpol yang sifatnya berada di permukaan atau berada di ranah media. Adanya tujuan dalam keperluan politik pada aktivitas parpol di Malaysia membuat kebutuhan parpol di Malaysia dan TKI mempunyai konektivitas yang sama, artinya parpol dan TKI sama-sama membutuhkan. Ternyata aktivitas mereka sulit dipetakan dikarenakan letak dan kondisi pemilu yang ada di luar negeri terlebih di Malaysia mempunyai cerita yang unik dibandingkan dengan pemilu di dalam negeri walaupun keduanya memiliki keunikan yang sama dengan jumlah pemilih yang banyak.

2.4 Parpol di Malaysia dari pemilu ke pemilu

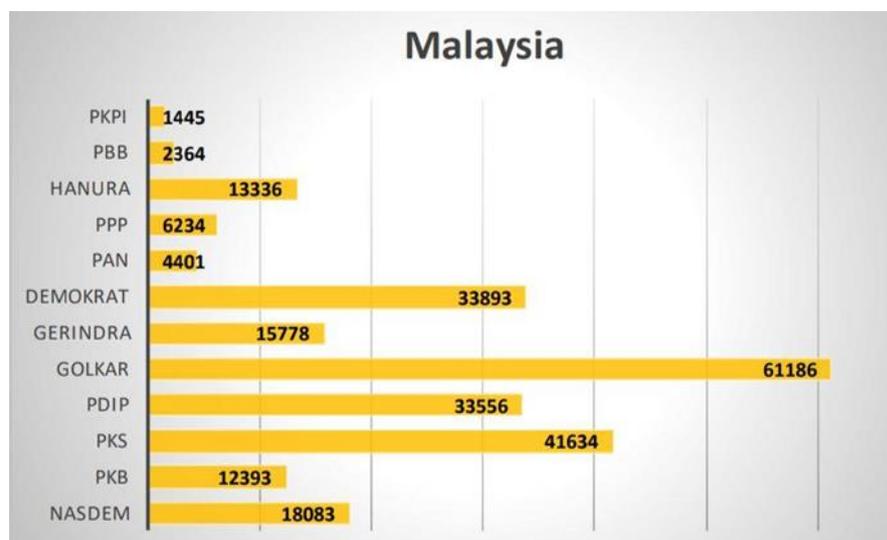
Di sini penulis memetakan aktor tiap partai politik agar dapat diketahui peta politik parpol di Malaysia secara umum maupun spesifikasi tiap-tiap parpol. Kali ini peran tokoh politik atau *elite politics* beserta identitas parpol mempunyai hubungan yang kuat di Malaysia. Para kader partai politik di Malaysia tidak lain mereka mayoritas sebagai seorang TKI yang sedang bekerja, sehingga kesamaan latar belakang sebagai TKI juga berpengaruh dalam koalisi partai untuk menghadapi pemilu. Selain membuka relasi antar parpol dan para kader partai dapat pula membuka koneksi baru untuk memperluas jaringan serta identitas mereka untuk bersosial dengan TKI yang lain yang bukan sebagai pengurus maupun kader parpol yang hanya menggunakan jabatan parpol bahkan lebih dari itu. John Aldrich (1995) mengatakan bahwa parpol sebagai koalisi elit parpol untuk menggunakan jabatan politik. (Tetapi) parpol sebenarnya lebih dari sebuah koalisi Parpol. Partai politik adalah koalisi yang dilembagakan, mengadopsi aturan, norma dan prosedur (Crotty, 2006).

Pandangan John Aldrich tersebut secara umum menunjukkan bahwa koalisi partai mempunyai kekuatan dalam mengadopsi peraturan-peraturan beserta norma-norma serta prosedur-prosedur. Pada akhirnya hal itu membuat koalisi parpol di Malaysia dapat mempengaruhi tendensi perlindungan untuk TKI sebagai obyek politik yang besar. Pada pemilu tahun 2014 di Malaysia Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) juga mempunyai sejarah persaingan ketat untuk memenangkan pemilu di Malaysia.

Pemilu tahun 2014 di Malaysia mempunyai sejarah unik untuk di bahas terlebih dinamika dukungan WNI kepada parpol. Regulasi politik di Malaysia bukan saja berada di dalam kondisi yang selalu monoton, namun pergolakan

politik di sana merupakan dinamika yang terus menerus mengalami perkembangan sesuai pengaruh para politikus yang berkuasa. Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) beserta para tokoh masyarakat maupun tokoh politik terbagi menjadi dua tujuan *pertama*, tujuan untuk menyejahterakan TKI dalam rangka memperkuat perlindungan *kedua*, pengaruh parpol dengan tujuan untuk mencapai kepentingan pribadi tokoh tersebut. Pemilu di Malaysia tahun 2014 sudah memberikan gambaran yang konkret bahwa kekuatan politik yang berpengaruh menggambarkan siapa parpol yang berkuasa, hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Tengku Adnan yang menjabat ketua PPLN Malaysia tahun 2014 lalu:

Tabel 2. Data PPLN mengenai hasil pemilu 2014 di Malaysia



Sumber: PPLN pemilu 2014 di Malaysia (Adnan, Wawancara, 2014)

Diagram tersebut menggambarkan ketimpangan suara terjadi di Malaysia akibat elite politik pada parpol yang menduduki kemenangan mempunyai pengaruh di Malaysia. Para politikus yang berada di dalam Golkar, PKS dan

Demokrat merupakan elite politik yang sudah mempunyai *track record* baik di kalangan TKI sehingga mereka tidak kesusahan untuk mencapai target parpol.

Banyak parpol di Malaysia yang mengalami pasang surut dalam kekuatan politik akibat pergantian tokoh politiknya di Malaysia. Ada pula di antara mereka tetap memegang teguh idealisme serta ideologi parpol. Pemilu 2014 merupakan langkah kongkret untuk memetakan fenomena tersebut di mana mayoritas anggota parpol di KBRI Malaysia beserta tokoh-tokoh TKI yang berubah-ubah haluan politiknya. Oleh karenanya terjadi perubahan dari pemilu ke pemilu khususnya fase dari pemilu 2014 ke pemilu 2019 yang akan datang.

Pernyataan sikap dari PKB pada pemilu di Malaysia juga merupakan keseriusan partai untuk mengawal surat suara sebaik mungkin. Potensi suara di luar negeri khususnya TKI di Malaysia telah disadari banyak parpol termasuk PKB yang mempunyai target besar di Dapil II DKI wilayah luar negeri. Dalam proses pengawalan tersebut ketua umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan sikap negatif terhadap pemilu luar negeri dengan adanya laporan bahwa buruknya layanan PPLN yang merugikan TKI (Detiknews, 2014)

Melihat banyaknya jumlah TKI di Malaysia Partai Persatuan Pembangunan PPP mempunyai target yang tidak sedikit. Adanya pelantikan pengurus DPP PPP tahun 2013 di Malaysia menunjukkan adanya operasional target yang ingin dicapai oleh partai tersebut untuk memenangkan pemilu. Acara pelantikan yang resmi itu telah menuai banyak dukungan "*Sebagai implementasi kerja sama Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam negeri, maka KBRI*

KL memfasilitasi kegiatan partai politik di Malaysia, seperti acara pelantikan ini” ujar Wakil Ketu Umum PPP Suharso Monoarfa (Antara, 2013).

Malaysia merupakan wadah TKI terbanyak hingga mencapai 1,5 juta jiwa yang menjadi TKI legal dengan sekitar 800.000 TKI yang ilegal yang menjadi calon pemilih dalam pemilu tahun 2019 mendatang. Tahun ini isu persiapan pemilu sudah mulai berdatangan karena banyak tim sukses dari berbagai pihak partai telah melakukan persiapan yang matang untuk memenangkan suara pada pemilu mendatang. Dalam konteks ini parpol yang sudah memiliki calon untuk diusung dalam pemilu sudah mulai menampakkan gerakannya sehingga muncul kecenderungan untuk membangun kepercayaan. Agar masyarakat terbiasa serta familier dengan calon yang diusung tersebut dan membuat kampanye berjalan signifikan.

2.5 Kampanye parpol

Pada hakikatnya kampanye merupakan informasi yang dibutuhkan para aktor politik melihat efek dari adanya kampanye politik itu dapat mempengaruhi ke ikut sertaan politik melalui berbagai cara dalam komunikasi (Scmitt-Beck, 2002). Untuk mendapatkan masa politik, parpol berkomunikasi dengan masyarakat untuk mensosialisasikan visi dan misi yang ingin dicapai sehingga proses penanaman kepercayaan terhadap masyarakat mendapatkan respon yang positif serta mempermudah jalanya birokrasi untuk mencapai kepentingan parpol di parlemen. Namun tidak mudah bagi parpol yang beraktivitas politik dan kampanye untuk mendapatkan kepercayaan TKI di Malaysia, terdapat batasan

hukum yang berlaku di negara tersebut yang mengakibatkan proses penanaman kepercayaan parpol terhadap TKI di Malaysia tidak semudah di dalam negeri.

Perkembangan gerakan parpol di Malaysia merupakan kondisi untuk menciptakan agenda kampanye parpol karena memang tujuan parpol adalah sebagai kendaraan politik bagi siapa saja yang ingin mendapat kekuasaan di pemerintahan. Tahun 2018 ini merupakan tahun dimana parpol sudah waktunya mengaktifkan kembali mesin politiknya untuk mengikat hati rakyat dalam rangka memenangkan pemilu 2019 mendatang. Sedikit demi sedikit elektabilitas parpol sudah mulai terbangun sebagai tanda dari kesiapan partai pengusung pada pemilu 2019. Jumlah TKI yang menjanjikan untuk mendapatkan dukungan suara menjadi prioritas dalam mencapai target parpol.

Identitas legal maupun ilegal TKI di Malaysia tidaklah menjadi pembahasan baru di kalangan pemerintah, namun dalam kondisi pemilu TKI yang tidak berdokumen resmi menjadi pembahasan tersendiri terkait keikutsertaan mereka dalam pemilu. Kondisi pemilu tahun 2009 lalu tercatat hampir 2 juta pemilih dari TKI dengan status legal mencapai 1.5 juta sisanya di isi oleh TKI ilegal dan pelajar, dengan jumlah tersebut TKI yang ilegal mempunyai hak untuk mengikuti pemilu. Meninjau konsep yang menjelaskan bahwa keikutsertaan TKI ilegal dalam pemilu ternyata di sahkan oleh PPLN jaminan ini yang diberikan oleh Da'i Bahtiar bahwa hak pilih harus didapatkan oleh seluruh TKI di Malaysia "*Kami daftarkan semua baik yang legal maupun yang ilegal*" demikian ujar beliau pada pemilu 2009 (Sari, 2008).

Pemilu di Malaysia sudah membawa banyak hikmah bagi calon-calon legislatif dan eksekutif yang melakukan kampanye terlebih di daerah pedalaman hutan sawit yang membawa kisah tersendiri bagi siapa saja politikus yang melakukan aksi kampanye. Seperti halnya dengan apa yang dilakukan oleh calon legislator Dwiki Dermawan dari Partai Amanat Nasional (PAN). Yang telah menemukan rentannya jiwa nasionalisme para TKI di Sabah akibat kurangnya perhatian pemerintah Indonesia. Di sela-sela kampanye Dwiki menanyakan TKI tentang pilihan kewarganegaraan mereka ternyata *“Lebih dari 60 persen ketika ditanya, menyatakan lebih memilih menjadi warga negara Malaysia,”* ujarnya (Detiknews, 2014)

Kiprah parpol terhadap TKI di Malaysia dapat menjalin hubungan diplomatis parpol dan TKI dengan baik. Di satu sisi interaksi tersebut mempunyai etiket untuk mengikat kepercayaan mereka kepada TKI dengan berbagai gerakan, disisi lain, parpol juga menjalankan politik sesuai skema yang sudah ditetapkannya sendiri. Kondisi itu membuat hubungan menarik ketika masa senggang seperti sekarang ini terdapat partisipasi parpol yang sudah mulai bermunculan ataupun yang masih aktif melakukan kegiatan. Diantara contohnya adalah gerakan partai Perindo pada Desember 2016 kemarin, partai tersebut sudah menyiapkan skema pengaturan dalam pemulangan TKI dari Malaysia ke Indonesia oleh DPLN partai (Okezone, 2016).

Dalam pemisalan yang lain terdapat beberapa parpol yang ingin memikat kerja sama dengan TKI Malaysia secara langsung maupun tidak dengan usaha-usaha yang di lakukan. Seperti halnya respon partai Demokrat yang melihat perlunya dapil luar negeri agar membuat pemilu di luar negeri semakin efektif

(Hakim, Lukmanul, 2017) Bukan hanya itu, aksi lain di tunjukkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah memberikan sumbangan kepada TKI yang terkena kanker hingga kembali ke Indonesia (Setiawan, Agus, 2017)

Tidak hanya itu upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperkuat jaringan ke Malaysia juga ditunjukkan dengan adanya kerja sama antara PPP dengan PAN, PAS, PKR, MCA dan UMNO untuk membahas TKI (Paat, Yustinus, 2017). Begitu pula gerakan Partai Golkar yang melakukan kunjungan ke Malaysia dan mengapresiasi KBRI pada penanganan TKI melalui pembahasan pada agenda hubungan Golkar dengan UMNO (Taufiqurrohman, 2016) dan disela kunjungan Surya Paloh di Universitas Kebangsaan bersama jajaran DPP Nasdem mengunjungi tempat penampungan TKI di Malaysia (Yusuf, 2016)

Pasokan suara pemilih dari kalangan TKI di Malaysia dibutuhkan oleh parpol sehingga memunculkan inisiatif parpol untuk memberi perhatian khusus bagi pengaruhnya terhadap TKI. Hal itu dapat dilihat dari gerakan PKB yang menginisiasi adanya keresahan atas masuknya TKI dari jalur yang tidak resmi sehingga status mereka ilegal untuk bekerja di Malaysia. PKB melihat fenomena masuknya TKI ilegal tersebut menjadi permasalahan utama yang harus di tangani untuk keselamatan kerja, oleh karenanya PKB membentuk satgas untuk membantu pemerintah dalam penanganan kasus-kasus yang dihadapi TKI. Tujuan adanya pembentukan satgas TKI tersebut yaitu sebagai satuan khusus untuk mendirikan posko-posko jalur tikus tidak resmi yang menjadi tempat keluar masuknya TKI diantaranya menuju Malaysia (Ihsanuddin, 2017).

Bantuan terhadap TKI di Malaysia tidak luput dari kepentingan parpol untuk menanam kepercayaan agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara TKI dan parpol. PKS merupakan parpol yang aktif membantu TKI di Malaysia mengingat popularitas PKS cukup baik di kalangan TKI khususnya pada saat mendekati waktu pemilu bantuan-bantuan PKS telah mewarnai semangat kampanye. Kesempatan di sore hari saat pulang kerja menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap para TKI. Untuk itu, kampanye para kader PKS secara langsung dilakukan untuk menanamkan popularitas PKS agar mereka terpilih saat pemilu 2019 mendatang (Malaysia P. P., 2018).

Proses kampanye parpol di Malaysia tidak luput dari sejarah lama untuk merintis kader parpol yang dapat diandalkan ketika pemilu tiba. Partai Demokrat sebagai parpol yang telah lama membentuk cabang di Malaysia dari 2008 yang lalu partai Demokrat telah bentuk lima cabang di Malaysia di antara lima Dewan Pimpinan Cabang Luar Negeri DPC LN tersebut adalah Kuala Lumpur, Perak, pahang, Melaka dan Negeri Sembilan (Detik.news, 2008). Di sisi lain, kesempatan untuk menyerap aspirasi TKI yang juga penting untuk dilakukan oleh parpol, dalam hal ini Nasdem sebagai parpol yang mulai tumbuh di Malaysia telah berinteraksi langsung dengan TKI di kongsi TKI Cyberjaya dengan acara buka puasa bersama (Setiawan, Agus, 2017).

Pembangunan relasi tidak cukup apabila berada di kalangan TKI saja, namun juga koneksi kepada pejabat ke Dubes Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) untuk menyampaikan aspirasi TKI merupakan tujuan utama interaksi politik. Nasdem telah menjalankan strateginya dalam melanjutkan hasil rapat internal Nasdem tersebut (Setiawan, Agus, 2018). Upaya pembangunan relasi juga dilakukan oleh

DPC LN PKB beserta ketua Muslimat cabang Malaysia kepada LBBP Rusdi Kirana dalam misi kebudayaan (Setiawan, Agus, 2017). Kunjungan kepada LBBP Rusdi Kirana juga muncul dari PAN dengan bahasan dokumen TKI yang ilegal yang menekankan bahwa nama paspor berada dalam nama KTP sehingga Surat Pengganti Laksana Paspor (SPLP) bisa di ganti dengan paspor biasa (Setiawan, Agus, 2018)

Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta menuai kesulitan dalam pengaturan pemilu di negeri jiran tersebut. Pada dasarnya kesulitan KPU terjadi akibat adanya kondisi pemilih yang berubah-ubah tempat kerja mereka sesuai dengan kondisi dan tuntutan ekonomi untuk bekerja. Kesulitan tersebut semakin kompleks akibat kendala atas penambahan kuota pemilih akibat bertambahnya TKI baru di Malaysia, oleh karenanya persoalan identitas menjadi kendala tersendiri belum lagi para TKI yang terkena kasus hukum yang mempersulit adanya pendataan (Rakhmatuloh, 2013).

2.6 Kondisi pemilu di Malaysia dari perspektif media

Media memberi pemahaman informasi cepat mengenai pemilu yang ada di permukaan dan dapat pula memaparkan rekam jejak fenomena di Malaysia sebelumnya. Di sisi lain peran media dapat di nyatakan untuk mengetahui kondisi aktivitas parpol yang ada pada pemilu tahun 2014 dan sebelumnya perspektif media tersebut menjadi salah satu hal yang penting untuk dibahas dengan memahami fenomena pemilu dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya untuk membaca kondisi sosial politik parpol sebelum penulis melakukan penelitian di lapangan maka perspektif media dibutuhkan dalam penelitian ini.

Lika liku pemilu 2009 menjadi pelajaran bagi siapa pun yang ingin mencalonkan diri untuk mendapatkan kursi di DPR maupun menjadi presiden di pemilu setelahnya. Kala itu Ade Daud Nasution mendirikan *Ade Daud Nasution Center* untuk konsultasi bisnis di Malaysia dengan tujuan politik yang jelas yaitu meraih minimal 1 kursi di DPR nantinya (Detiknews, 2009). Usaha tersebut merupakan platform nyata sebagai calon DPR agar merebah kondisi TKI untuk memilih beliau, dalam hal ini proses kampanye yang dilakukan Ade telah menjadi dedikasi nyata bagi TKI terlebih bagi mereka yang mendapat pencerahan dalam pengembangan bisnis di Malaysia.

Pada pemilu tahun 2014 di Malaysia telah membawa kesan tidak kalah serunya dengan pemilu yang ada di Indonesia PPLN juga melayani masyarakat dengan servis semaksimal mungkin. Pelayanan tersebut tidak luput dari etos kerja yang sistematis oleh PPLN khususnya di Malaysia, bahkan penyebaran surat suara hingga ke pelosok-pelosok desa dan penyebaran surat suara hingga ke ladang sawit. Tempat tinggal para TKI berada di berbagai wilayah terutama ladang sawit yang menjadi tempat berkumpul TKI di daerah terpencil, namun diperlukan identitas kewarganegaraan Indonesia untuk TKI yang ingin melakukan pencoblosan (Taufiqurrahman, 2014).

Mekanisme serta kepastian surat suara dalam pemilu 2014 kemarin menjadi contoh kongkret untuk PPLN dalam menghadapi kasus surat suara pada pemilu 2019 mendatang. Sebagai aparat negara yang mengatur pemilihan umum di Malaysia tentunya PPLN telah mempersiapkan dengan matang proses pendataan pemilih untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penggelembungan suara. Kesalahan semacam itu dapat mengurangi adanya eksklusifitas PPLN

terhadap pemilu itu sendiri, karena obyektivitas PPLN tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pada pemilu 2014 lalu telah terjadi kasus kecurangan yang diduga oleh salah satu LSM *Migrant Care* telah terdapat 22.000 penggelembungan suara dalam pemilu 2014 di Malaysia (Hendratmoko, 2014).

Antusiasme pemilih dari TKI di Malaysia memang tidak kalah hebat dengan pemilu di Indonesia karena hakikatnya mereka mengalami beberapa kendala yang membuat pemilu di Malaysia juga mendapat respon rendah. Hal itu terjadi akibat adanya faktor-faktor yang mengakibatkan rendahnya keikutsertaan pemilu tahun 2014 diantaranya ketakutan mereka akan razia bagi TKI yang tidak lengkap dokumennya, begitu pula jarak tempat pemilu dan tempat tinggal TKI yang jauh sehingga mereka harus mengeluarkan dana transportasi yang besar, dan banyak dari TKI yang tidak tahu tentang sosialisasi pemilu (Bonasir, Rohmatin, 2014).

Meninjau pengalaman pemilu sebelumnya telah ditunjukkan bahwa pemilu legislatif dan presiden di Malaysia rendah sehingga tingkat pemilih tidak mempunyai antusias besar dalam pesta demokrasi tersebut. Peristiwa itu sudah mulai mendapat perhatian dari PPLN maupun kedubes Indonesia yang telah menyaksikan hanya 11% dari 450 ribu WNI dan bagi pemilu presiden 30% dari 450 WNI di Kuala Lumpur dengan persentase besar sebagai TKI terbukti kurang dalam berkontribusi melakukan pemilu Legislatif (Lazuardi, 2018). Kekurangan dalam partisipasi tersebut dalam hal ini di klarifikasi sebagai ke tidak tahuan masyarakat akan tokoh yang mereka pilih terlebih dalam pemilu legislatif.

Kesiapan dini KJRI di Malaysia sudah mulai muncul akibat permasalahan yang bervariasi terjadi pada pemilu 2014 sebelumnya. Panitia PPLN di Malaysia sudah mulai dibentuk untuk mengantisipasi pendataan yang tidak valid (Sekarwati, Suci, 2018). Bentuk kerja sama antara Pihak KJRI dan Migrasi itu berlangsung untuk menyukseskan pemilu 2019 mendatang sehingga dapat dipastikan progres-progres PPLN yang lain dapat berjalan dengan baik dengan antusias para pemilih dari TKI meningkat.

Konsolidasi politik yang dilakukan PKB dalam persiapan pemilu 2019 memperbesar optimisme partai dalam memenangkan pemilu di Malaysia, hal itu dinyatakan dalam pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC LN PKB khusus Malaysia. Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa “Kami sangat berharap agar pengurus yang telah dilantik bisa melaksanakan konsolidasi partai dengan baik dan maksimal. Dengan demikian, pada pemilu 2019 mendatang dapat meraih suara terbanyak khususnya di Malaysia keyakinan tersebut muncul karena banyaknya warga NU yang menjadi TKI dan mendukung PKB (Hutasoit, 2015).

Pasangan pemilu presiden (Pilpres) nomor urut 2 Jokowi-Jusuf Kalla pada saat kampanye tahun 2014 kemarin cukup menjadikan isu yang populer di kalangan TKI Malaysia. Akibat persamaan latar belakang antara TKI dengan Jokowi yang basisnya sama-sama orang desa maka muncul prediksi bahwa para TKI lebih memihak calon urut 2 dibandingkan calon urut 1 yang kala itu Prabowo-Hatta. Maka prediksi waktu itu terdapat 6,5 juta TKI di Luar negeri mendukung capres nomor urut 2 dengan harapan bahwa Jokowi bisa merevisi kembali UU nomor 39 tentang ketenagakerjaan (Sadikin, 2014).

Persaingan sengit antara capres nomor urut 1 dan nomor urut 2 telah membuat banyak momen di pemilu 2014. Protes dilakukan beberapa pihak diantaranya dari pihak PKB Muhaimin Iskandar telah menyalahkan Bawaslu untuk adanya pemilu ulang dengan alasan cara kerja PPLN membuat kecurangan pada pemilu (Detiknews.com, 2014). Namun hal itu berbanding terbalik dengan kondisi PKS ketika unggul di salah satu pabrik Western Digital di daerah Sabah, Serawak dan Kuala Lumpur PKS unggul 34% dengan PDIP 30% PD 20% Golkar 16% (Piyugan, 2014).